

SEJARAH UMAT ISLAM DAN DINAMIKA SOSIAL POLITIK KOMUNITAS MORO DI FILIPINA SELATAN

Fadil Muhammad¹, Rava Andrio², Ellya Roza³

fadilmuhammad308@gmail.com¹, raffaandrio@gmail.com², ellya.roza@uinsuska.ac.id³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Artikel ini membahas sejarah perkembangan Islam di Filipina Selatan, khususnya pada komunitas Muslim Moro, yang memiliki akar peradaban Islam sejak abad ke-13. Melalui jalur perdagangan dan dakwah, Islam berkembang pesat di wilayah Sulu, Mindanao, dan sekitarnya, kemudian membentuk kekuatan politik melalui berdirinya Kesultanan Sulu dan Kesultanan Mindanao. Namun, penetrasi kolonial Spanyol, disusul Amerika Serikat, mengubah konstelasi sosial-politik umat Islam dan menempatkan mereka sebagai kelompok minoritas yang termarginalkan. Kondisi tersebut berlanjut setelah Filipina merdeka, menciptakan ketegangan berkepanjangan antara pemerintah pusat dan masyarakat Moro. Penelitian ini menggunakan metode studi sejarah melalui penelusuran literatur untuk menelaah proses islamisasi, dinamika perlawanan, serta lahirnya gerakan separatis seperti MNLF, MILF, dan Abu Sayyaf. Temuan kajian menunjukkan bahwa identitas keislaman menjadi basis perlawanan dan simbol konsolidasi sosial-politik umat Moro dalam mempertahankan budaya, agama, dan wilayahnya. Upaya perjanjian damai, termasuk keterlibatan Indonesia sebagai mediator, menggambarkan bahwa konflik Moro tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga terkait dengan solidaritas dunia Islam. Pada akhirnya, perjuangan Moro merupakan refleksi atas tuntutan keadilan, pengakuan identitas, dan upaya memperoleh otonomi yang berdaulat dalam kerangka negara Filipina.

Kata Kunci: Philipina, Islam, Sejarah.

ABSTRACT

This article discusses the history of the development of Islam in the Southern Philippines, particularly in the Moro Muslim community, which has its roots in Islamic civilization since the 13th century. Through trade and da'wah, Islam flourished in the provinces of Sulu, Mindanao, and its surroundings, then formed a political power through the establishment of the Sultanate of Sulu and the Sultanate of Mindanao. However, Spanish colonial penetration, followed by the United States, changed the socio-political constellation of Muslims and placed them as a marginalized minority group. This continued after the Philippines' independence, creating prolonged tensions between the central government and the Moro people. This research uses the method of historical study through literature search to examine the process of Islamization, the dynamics of resistance, and the birth of separatist movements such as the MNLF, MILF, and Abu Sayyaf. The findings of the study show that Islamic identity is the basis of resistance and a symbol of the socio-political consolidation of the Moro community in defending their culture, religion, and territory. The peace treaty effort, including Indonesia's involvement as a mediator, illustrates that the Moro conflict is not only national, but also related to the solidarity of the Islamic world. In the end, the Moro struggle is a reflection of the demands for justice, recognition of identity, and the effort to obtain sovereign autonomy within the framework of the Philippine state. Keywords: Philosophy, Islam, History.

Keywords: Philippines, Islam, History.

PENDAHULUAN

Menurut Azyumardi Azra bahwa kawasan Asia Tenggara terbagi menjadi tiga bagian berdasarkan atas pengaruh yang diterima wilayah tersebut. Pertama adalah wilayah Indianized Southeast Asia, Asia Tenggara yang dipengaruhi India yang dalam hal ini hindu dan budha. Kedua, Sinized South East Asia, wilayah yang mendapatkan pengaruh

China, adalah Vietnam. Ketiga, yaitu wilayah Asia Tenggara yang dispanyolkan, atau Hispainized South East Asia, yaitu Philipina. Ketiga pembagian tersebut seolah meniadakan pengaruh Islam yang begitu besar di Asia Tenggara, khususnya Philipina. Seperti tertulis bahwa Philipina termasuk negara yang terpengaruhi oleh Spanyol. Hal itu benar adanya, akan tetapi pranata kehidupan di Philipina juga terpengaruhi oleh Islam pada masa penjajahan amerika dan spanyol. Makalah ini akan menyingkap dengan singkat tentang sejarah masuknya Islam di Philipina.

Islam di Asia menurut Dr. Hamid dalam bukunya yang berjudul “Islam Sebagai Kekuatan International”, Dr. Hamid mencantumkan bahwa Islam di Philipina merupakan salah satu kelompok minoritas diantara negara-negara yang lain. Daristatistik demografi pada tahun 1977, masyarakat Philipina berjumlah 44. 300.000 jiwa. Sedangkan jumlah masyarakat Muslim 2.348.000 jiwa. Dengan prosentase 5,3% dengan unsur dominan komunitas Mindanao dan mogondinao.

Asia tenggara adalah sebutan untuk wialyah daratan Asia bagian timur yang terdiri dari jazirah Indo-Cina dan kepulauan yang banyak serta terilingkupi dalam Negara Indonesia dan Philipina. Melihat sejarah masa lalu, terlihat bahwa Islam bukanlah agama pertama yang tumbuh pesat, akan tetapi Islam masuk ke lapisan masyarakat yang waktu itu telah memiliki peradaban, budaya, dan agama. Dalam makalah ini, pemakalah akan membahas beberapa hal penting tentang Islam di Filipina. Antara lain: Sejarah masuknya Islam di Filipina, faktor-faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Hal-hal tersebut menjadi pembahasan dalam makalah ini, karena merupakan sebuah upaya besar dalam mengangkat dan menyebarluaskan agama Islam.

Dari latar belakang di atas, penulis mengemukakan permasalahan sebagai pokok pembahasan dalam makalah ini. Bagaimana sejarah masuknya Islam di Filipina? Bagaimana perkembangan Peradaban Islam di Filipina dan bagaimana komunitas moro di filipina Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan dalam penelitian sejarah, meliputi tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, serta historiografi. Tahap pertama yaitu heuristik dilakukan dengan menghimpun berbagai informasi dari beragam sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Setelah proses pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah melakukan kritik sumber. Seusai tahapan heuristik tersebut, data diseleksi dan dianalisis secara kritis, baik dari sisi internal maupun eksternal, untuk mendapatkan fakta yang bersifat objektif. Setelah proses kritik dilakukan secara mendalam dan cermat, barulah kajian dilanjutkan ke tahap penafsiran (interpretasi). Untuk mendapatkan fakta sejarah yang valid, penelitian harus dilakukan secara teliti dan objektif. Sumber data diperoleh melalui literatur akademik, jurnal penelitian, serta berbagai laporan sejarah yang berkaitan dengan komunitas Muslim Moro di Filipina Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Masuknya Islam Di Philipina

Filipina adalah sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari 7107 pulau. Penduduknya yang berjumlah 47 jiwa menggunakan 87 dialek bahasa yang berbeda yang mencerminkan banyaknya suku dan komunitas etnis. Sebelum kedatangan Islam, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Islam dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini Islam masuk ke wilayah Filipina

Selatan, terutama sebuah kepulauan Sulu, Mindanao kurang lebih pada tahun 1380 Masehi. Seorang ulama Arab dan tabib bernama Karimul Makhdum, bersama Raja Baguinda, dikenal sebagai tokoh pertama yang memperkenalkan serta menyebarkan ajaran Islam di Kepulauan Sulu dan Mindanao.

Menurut rekaman sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari ranah minang Minang kabau (Sumatra Barat). Beliau tiba di kepulauan Sulu kurang lebih (10) sepuluh tahun setelah ia berhasil menyebarkan ajaran/agama Islam di kepulauan Zamboanga dan Basilan. Dari hasil jerih paya, usaha kerja kerasnya untuk meyakinkan raja tentang agama islam, akhirnya raja Kabungsuwan Manguindanao, penguasa yang terkenal terkenal dari kepulauan Manguindanao menerima ajaran islam dan masuk islam. Dari titik inilah awal peradaban Islam di wilayah ini mulai dirintis. Namun, terdapat pendapat lain mengenai masuknya Islam ke Kepulauan Sulu. Disebutkan bahwa Islam telah hadir di Sulu sejak abad ke-9 melalui jalur perdagangan. Akan tetapi, hal tersebut belum menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam sejarah Sulu hingga abad ke-13, ketika para penyebar Islam (da'i) mulai menetap untuk pertama kalinya di Buasna (Jolo) dan kemudian melanjutkan penyebaran ajaran Islam ke berbagai daerah lain di Kepulauan Sulu.¹

Masuknya Islam di wilayah tersebut berasal dari bagian selatan, yaitu melalui Pulau Sulawesi dan Sumatra. Beberapa sumber menyebutkan bahwa penyebaran Islam di daerah itu terjadi sekitar abad ke-13, tepatnya sekitar tahun 1365 Masehi. Pada tahun 1973, bahasa Arab mulai digunakan sebagai bahasa pengantar dalam proses pengajaran di sekolah-sekolah yang diikuti oleh masyarakat Muslim, dan dua hari besar Islam secara resmi ditetapkan sebagai hari libur bagi umat Islam. Lembaga keuangan Islam pun berkembang dalam bentuk lembaga zakat, wakaf, serta sistem perbankan Islam. Lembaga-lembaga tersebut mengelola berbagai kegiatan seperti perseroan terbatas, asuransi, dan manajemen lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pada tahun 1977, Undang-Undang Hukum Perdata Muslim Nasional disahkan, meskipun penerapannya belum sepenuhnya dilakukan di seluruh kantor peradilan maupun wilayah yang memberlakukan hukum syariat.² Dirasa penting untuk membicarakan Kesultanan dan sisiliah sulu yang biasa juga di sebut tarsila sulu karna masuk dan berkembangnya isla di Filipina tida dapat di pisahkan dari kerajaan kesultanan sulu³

Menurut Dr. Hamid, penyebaran Islam di Asia terbagi menjadi tiga bentuk. Pertama, penyebaran Islam yang menghasilkan mayoritas penduduk Muslim. Kedua, kelompok masyarakat Muslim yang berstatus minoritas. Ketiga, kelompok negara-negara Islam yang hidup dalam kondisi tertindas. Dalam karyanya yang berjudul *Islam Sebagai Kekuatan Internasional*, Dr. Hamid menyebut bahwa Islam di Filipina termasuk dalam kategori kelompok minoritas di antara negara-negara lainnya. Seorang ulama dan tabib asal Arab bernama Karimul Makhdum bersama Raja Baguinda tercatat sebagai tokoh pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Berdasarkan catatan sejarah, Raja Baguinda merupakan seorang pangeran yang berasal dari Minangkabau (Sumatra Barat). Ia tiba di Kepulauan Sulu sepuluh tahun setelah berhasil menyebarkan dakwah Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Berkat usahanya yang gigih pula, akhirnya Kabungsuwan dari Maguindanao, salah satu raja terkenal di wilayah tersebut, memeluk

¹ Hasaruddin, "Perkembangan Sosial Islam di Filipina", dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol,01 No.01.2019:33-34

² Syahraeni. A "Islam di Filipina" dalam *Jurnal Adabiyah*, Vol, 10 No.01.2010.193-196

³ Sa. Saifullah, "Umat Islam di Filipina Selatan", dalam *jurnal islamica* Vol,03 No.01.2008:54

agama Islam.⁴

Filipina juga tercatat pernah mengalami masa penjajahan oleh bangsa Eropa, yaitu Spanyol. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Filipina sempat dijajah oleh Spanyol dan Amerika. Ketika Spanyol mulai menjajah Filipina pada tanggal 16 Maret 1521, Kesultanan Sulu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1450, atau sekitar 71 tahun sebelumnya. Pemerintah kolonial Spanyol berhasil menaklukkan wilayah utara Filipina dengan relatif mudah tanpa adanya perlawanan besar, berbeda halnya dengan bagian selatan Filipina yang menjadi pusat masyarakat Islam. Di wilayah selatan ini, penduduk Muslim melakukan perlawanan sengit dengan penuh keberanian dan semangat pantang menyerah. Masuknya Islam ke Kepulauan Sulu diperkirakan terjadi pada abad ke-13 melalui ajaran yang diperkenalkan oleh Tuan Mashaika. Islam bahkan pernah menjadi agama mayoritas di Filipina, namun kedatangan penjajah Spanyol dan Amerika, ditambah dengan situasi politik yang berkembang di Filipina, menyebabkan Islam kemudian berubah menjadi agama minoritas di negara tersebut.⁵

Komunitas Moro Sebagai Masyarakat Awal Islam Di Filipina

Komunitas Moro merupakan kelompok etnoreligius Muslim yang mendiami wilayah Filipina bagian selatan dan telah eksis sejak abad ke-14. Kelompok ini terdiri dari sekitar 13 suku, di antaranya suku Maguindanao, Tausug, dan Maranao. Sejarah mereka diwarnai oleh penindasan selama masa penjajahan Spanyol dan Amerika, yang kemudian memicu perjuangan panjang untuk memperoleh kemerdekaan dan otonomi bagi masyarakat Muslim Moro. Komunitas ini menempati wilayah yang mencakup 13 provinsi yang berada di bawah ketentuan Undang-Undang Empat Zona yang berbeda. Pertama, wilayah yang termasuk dalam Zona IV mencakup gugusan Pulau Palawan; kedua, wilayah yang termasuk dalam Zona IX meliputi Pulau Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, dan Zamboanga del Sur; ketiga, wilayah yang tergabung dalam Zona XI meliputi gugusan pulau Cotabato Selatan, Dan Davao del sure; sedangkan keempat, masuk dalam zona XII seperti Lanao del Norte, Lanao del Sure, Cotabato Utara, Maguindanao dan sultan Kudarat.⁶

Moro merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut kelompok etnolinguistik Muslim di Filipina. Berdasarkan sensus tahun 2010, sekitar 5,6 persen penduduk Filipina beragama Islam, sedangkan menurut Komisi Nasional Muslim Filipina pada tahun 2012, jumlah sebenarnya diperkirakan mencapai sekitar 11 persen dari total populasi. Sebagian besar umat Muslim Filipina bermukim di Pulau Mindanao bagian selatan, Pulau Palawan, serta Kepulauan Sulu. Kelompok etnolinguistik utama di antara masyarakat Moro meliputi suku Maguindanao, Maranao, Tausug, Samal, Bajau, Yakan, Ilanon, Sangir, Melabugnan, dan Jama Mapun. Namun, terdapat tiga kelompok besar yang menjadi mayoritas di antara penduduk Moro, yaitu suku Maguindanao yang berasal dari Provinsi Cotabato Utara, Sultan Kudarat, dan Maguindanao; suku Maranao dari dua Provinsi Lanao; serta suku Tausug dari wilayah Jolo. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh Masyarakat ini, sebagaimana halnya bahasa Tagalog dan sebagian besar bahasa lain yang dituturkan oleh masyarakat Filipina non-Muslim, termasuk dalam cabang bahasa Melayu-Polinesia yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia.⁷

Berdirinya Kesultanan Mindanao dan Sulu merupakan tonggak penting dalam tradisi

⁴ Hasararuddin, "Perkembangan Sosial Islam di Filipina", dalam *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*. Vol.01 No.01.2019:62-63

⁵ sari meta ratna, dkk, "Studi Pendidikan Islam di Filipina", dalam *jurnal ilmiah keislaman*, Vol,01 No.01. 2013:62

⁶ Gafur Abd, "Dinamika Muslim Moro Di Philipina Selatan Dan Gerakan Sparitis Abu Sayyaf", dalam *jurnal sosial dan budaya* Vol, 13 No.02.2016:176

⁷ <https://minorityrights.org/communities/moro-muslims/>

sejarah politik suku Tausug secara khusus dan umat Muslim Moro secara umum. Kekuasaan Sultan Sulu dimulai pada tahun 1450 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Abu Bakar, dan bertahan hingga tahun 1915 ketika tekanan politik dari kekuasaan kolonial Amerika semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa Kesultanan Sulu mampu bertahan selama hampir 500 tahun dan tidak berhasil ditaklukkan oleh kolonial Spanyol. Namun, sebagian sejarawan berpendapat bahwa kesultanan sebagai suatu sistem pemerintahan baru benar-benar mengalami kejatuhan pada tahun 1936 M, ketika pihak Persemakmuran menolak untuk mengakui pewaris mana pun yang menentang kekuasaan Sultan Jamalul II sebagai penguasa terakhir. Pembentukan komunitas politik yang terorganisir sebagai hasil dari penyatuan *banua* (komunitas) yang terpusat memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Tausug di wilayah Kesultanan Sulu. Kesultanan Sulu tidak hanya mencakup masyarakat suku Tausug saja, tetapi juga memiliki kendali atas beberapa suku lainnya seperti Samal, Yakan, dan Bajau yang beragama Islam, termasuk juga berbagai suku yang mendiami wilayah Zamboanga dan Basilan).⁸

Dalam uraian berikut akan dijelaskan beberapa hal terkait Muslim Moro, antara lain mengenai potret Muslim Moro dari awal masuknya Islam hingga terbentuknya Kesultanan Mindanao dan Sulu; selanjutnya membahas nasib Muslim Moro pada masa penjajahan Spanyol dan Amerika hingga memasuki era Filipina merdeka. Tidak kalah menarik, penulis juga menguraikan serta menganalisis pergerakan Muslim Moro, yaitu Moro National Liberation Front (MNLF, 1971) yang dipimpin oleh Nur Misuari, Moro Islamic Liberation Front (MILF, 1984) yang dipimpin oleh Hasyim Salamat, dan terakhir gerakan Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Abdurrazzak Janjalani (1993). Pergerakan Abu Sayyaf yang muncul lebih belakangan ini cenderung mengambil langkah-langkah radikal dan ekstrem, sehingga banyak pengamat mengkategorikan organisasi tersebut sebagai kelompok teroris.⁹

Sentuhan awal islam di philipina selatan

Filipina merupakan sebuah negara yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil. Dua pulau terbesar adalah Luzon dan Mindanao, yang mencakup sekitar dua pertiga dari keseluruhan wilayah Filipina. Selain itu, ada pulau-pulau lain seperti Mindoro, Panay, Negros, Cebu, Bohol, Leyte, Samar, Masbate, serta Pulau Palawan. Filipina memiliki sejumlah gunung berapi, seperti yang terdapat di pulau Batan dan Babuyan di utara Luzon, serta beberapa gunung di bagian selatan Luzon. Di Batangas terdapat Gunung Taal, di Albay ada Gunung Mayon, dan di bagian utara Negros terdapat Gunung Camlon. Selain itu, ada juga Gunung Apo di Davao. Gunung-gunung berapi tersebut menyebabkan tanah di sekitarnya sangat subur sehingga cocok untuk pertanian. Sebagian besar wilayah Filipina memiliki curah hujan yang tinggi, kecuali daerah Cagayan (timur laut Pulau Palawan), bagian tenggara Pulau Negros dan Cebu, wilayah Zamboanga, serta hulu Teluk Sarangani yang mengalami curah hujan rendah dan musim kemarau yang relatif panjang. Pembahasan mengenai Kesultanan dan Silsilah Sulu (juga dikenal sebagai Tarsilah Sulu) dianggap penting karena perkembangan Islam di Filipina sangat terkait erat dengan keberadaan Kesultanan Sulu. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat beberapa versi Silsilah dan Tarsilah Sulu yang kadang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain.

Hal ini terjadi karena campuran antara dongeng atau mitos dengan fakta sejarah. Oleh sebab itu, penting untuk menggunakan berbagai sumber Silsilah dan Tarsilah yang beragam serta melakukan analisis mendalam untuk kemudian menyimpulkan. Hampir

⁸ Abd. Ghofur, "Dinamika Muslim Moro Di Philipina Selatan Dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf" ,*Sosial Budaya*, Vol. 13, No.2, 2016:175-188.

⁹ Abd. Ghofur, "Dinamika Muslim Moro Di Philipina Selatan Dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf" ,*Sosial Budaya*, Vol. 13, No.2, 2016:175-188

semua Silsilah bermula pada masa pemerintahan Rapa Sipad (dari bahasa Sanskerta: Raja Shripaduka) di Pulau Jolo, saat seorang Muslim bernama Tuan Masha'ika datang ke daerah yang disebut Maimbung di bagian selatan Pulau Sulu. Sebuah batu nisan bernama Miqbal dengan tanggal tahun 1310 ditemukan di Badatto, tidak jauh dari Jolo di Pulau Sulu. Penemuan batu nisan ini menjadi salah satu bukti arkeologis penting mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Filipina. Pada waktu itu, masyarakat di Pulau Jolo masih menganut kepercayaan berhala dan animisme.

Karena kelebihan yang dimiliki Tuan Masha'ika, ia diterima dan dihormati oleh masyarakat setempat, bahkan dinikahkan dengan puteri Rapa Sipad. Tuan Masha'ika memiliki tiga anak, salah satunya bernama Aisha, satu lagi Tuan Hakim yang memiliki empat anak laki-laki bernama Tuan Da'im, Tuan Buda, Tuan Bujang, dan Tuan Muku, serta seorang puteri yang namanya tidak diketahui. Keempat putera Tuan Hakim (yang berarti cucu Tuan Masha'ika) memerintah di Maimbung. Inilah titik awal masuknya Islam di Filipina, bersamaan dengan ditemukannya batu nisan Miqbal di Badatto, dekat Jolo, pada tahun 1310.¹⁰

Konflik Moro

Islam masuk ke Filipina abad ke-13 M yang dibawa oleh para pedagang Arab yang berasal dari Indonesia(sumatera) dan juga Malaysia. Setelah masuknya islam di Filipina, berdirilah kesultanan-kesultanan Islam yang mempunyai pemerintahan dan kedaulatan, di antaranya adalah Sulu dan Mindanao. Muslim moro atau mindanao mendiami wilayah dalam 13 provinsi yang terbagi dalam empat zona yang berbeda dibawah undangundang Filipina.

Setelah Filipina merdeka dari penjajahan kolonial spanyol dan Amerika, Muslim Moro di Filipina Selatan masih meneruskan kebijakan lama sewaktu di jajah. Penindasan tersebut dilakukan Pemerintah Filipina dan juga golongan katolik yang menjadi mayoritas disana. Penindasan yang menyengsarakan rakyat muslim moro memiliki tujuan untuk pemerataan tanah muslim di Filipina selatan demi kepentingan ekonomi Filipina Utara dan juga politik nya kita dapat menganalisa bahwa awal mula gerakan pemberontakan muslim moro pada masa kemerdekaan Filipina berawal dari gerakan MIM, yang akan menjadi cikal bakal lahirnya suatu pergerakan lainnya seperti MNLF, MILF, dan Abu Sayyaf. MNLF : MORO NATIONAL LIBERATION FRONT/FRONT PEMBEBASAN NASIONAL MORO Merupakan suatu gerakan perjuangan yang berbau radikal yang bertujuan untuk memperoleh kemerdekaan sepenuhnya tas Filipina selatan. Gerakan ini dipelopori oleh Nur Misuari pada tahun 1969..¹¹ Kerangka perjuangan orang Moro ternyata telah memunculkan dimensi lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Filipina. Orang-orang Moro lebih menginginkan sebagai orang Muslim daripada sebagai orang Filipina. Hal inilah yang menyebabkan orang Moro sulit melakukan kompromi dengan pemerintah.

Dalam kalangan orang-orang Moro, Islam menjadi ikatan mereka, sebab Islam juga sudah merupakan ikatan pemersatu di dalam masyarakat Muslim di Asia Tenggara (Taufiq Abdullah, 1976). Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak membedakan antara hukum dan adat. Banyak hukum dikesampingkan karena dianggap kontradiksi dengan adat yang berlaku.¹² Resolusi konflik di Mindanao sendiri sulit terjadi karena perbedaan-

¹⁰ Saifullah SA, "Umat Islam Di Filipina Selatan Sejarah, Perjuangan Dan Rekonsiliasi", *Islamica*, Vol. 3, No. 1, 2008:54-55

¹¹ Ayni Nuril, "Masalah Moro: Sebuah Kajian Perkembangan Kasus Konflik Internal Moro Hingga Kancah Internasional (1946-2019)", Dalam *jurnal Bakaba*, Vol.09 No.01.2021:10

¹² Wiharyanto Kardiyat, "Perkembangan Masalah Moro 1975-1994" dalam *jurnal seri pengetahuan dan pengajaran sejarah*, Vol.28 No.01.2014.

perbedaan yang ada, serta kemauan untuk menyelesaikan konflik yang sangat minim dari kedua belah pihak. Kompromi seringkali tidak terjadi karena tidak ada pihak yang mau mengalah. Untuk itu, perlu dibuat sebuah langkah-langkah khusus untuk melakukan resolusi konflik di Mindanao ini¹³ DAN TERNYATA Indonesia juga terlibat dalam perdamaian atau penyelesaian konflik moro di Filipina selatan.

Setelah berdirinya MNLF, Presiden Ferdinand Marcos menanggapi gerakan MNLF dan berbagai perlawanan Muslim di Mindanao dianggap sebagai pemberontak dengan memberlakukan Martial Law atau keadaan darurat perang pada tahun 1972. Ia mengirim tentara besar-besaran ke Mindanao untuk menumpas pemberontakan dan tuntutan merdeka yang mulai membesar. Reaksi keras dari presiden Marcos justru semakin menguatkan dukungan dari Bangsa Moro untuk MNLF Sadar dengan dampak negatif permusuhan itu terhadap kestabilan politik, pemerintah Filipina melakukan peningkatan hubungan diploma- 59 Indonesian Perspective, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2018): 52-64 tik dengan negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Filipina adalah salah satu pelopor ASEAN sehingga Filipina memiliki akses hubungan kerjasama dengan negara-negara pelopor lainnya, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Keberadaan Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim membuat Filipina merasakan perlunya hubungan politik yang kuat antarnegara tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian konflik di Filipina Selatan. Melalui hubungan politik Filipina dengan negara-negara tetangga, Filipina mampu membangun kembali hubungan yang sebelumnya renggang dengan Malaysia. Dalam konteks konflik MNLF-pemerintah Filipina, Malaysia mendukung gerakan masyarakat Muslim di Filipina Selatan. Hubungan yang baik dengan Malaysia memberi harapan meminimalisasi suplai persenjataan terhadap MNLF. Memperluas hubungan dengan dunia Muslim juga termasuk dalam strategi politik yang dilakukan oleh pemerintah Filipina untuk memperlemah moral pasukan MNLF. Pada tahun 1975 Filipina mengirim delegasinya untuk mengikuti konferensi di Arab dan dalam kesempatan itu pemerintah Filipina menawarkan otonomi Muslim di Mindanao dan Sulu sebagai bentuk upaya meredam konflik Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina terhadap negara-negara Muslim merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan stabilitasi kawasan Filipina Selatan, yang mana konflik antara pemerintah Filipina dengan pejuang Moro belum menemukan titik terang bahkan setelah beberapa perjanjian perdamaian terbentuk. Namun, dengan adanya kerjasama antara Filipina dan negara-negara Muslim, salah satunya Yordania yang merupakan penyuplai bantuan terhadap pasukan pejuang Moro, akhirnya bantuan dari Yordania kepada pejuang Moro dihentikan¹⁴

Keterlibatan Indonesia sebagai mediator tidak lepas dari mandat yang diberikan melalui pertemuan Cipanas pada 14-16 April 1993. Kala itu sebagai upaya untuk meredakan konflik, Indonesia menerapkan beberapa strategi mediasi dengan memfasilitasi 4 kali pertemuan resmi, 10 kali pertemuan dengan pembahasan pada tingkat komite gabungan, serta 77 kali pertemuan pada pembahasan di ranah teknis. Pada pertemuan komite gabungan pada Desember 1993 yang bertempat di Kota Jolo, dihasilkan beberapa kesepakatan salah satunya adalah gencatan senjata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Filipina dan juga MNLF. Selain itu, Indonesia akan mengirimkan Kontingen Garuda sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian.. Pada 2 September 1996, Indonesia yang saat itu menjadi ketua ASEAN kemudian mengakomodasi proses penandatanganan perjanjian

¹³ Raden Mas Jerry Indrawan, "Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro Di Filipina", dalam *Jurnal International & Diplomacy* Vol. 2, No. 1.2016:121

¹⁴ Dewa Anggara," Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)" Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1 2018:58-59

damai. Dari pertemuan ini ada beberapa poin yang menjadi hasil kesepakatan kedua belah pihak yaitu (1) proses penggabungan MNLF ke tentara Filipina, (2) Pembentukan Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), serta proses diskusi terkait (3) pembagian sumber daya alam.¹⁵

Dinamika Muslim Moro Di Filipina Selatan Dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf

Perjuangan Muslim Moro memasuki fase baru setelah Filipina merdeka. Gerakan terorganisir paling awal muncul pada tahun 1968 M dengan nama *Muslim Independent Movement* (MIM). Gerakan pembebasan Muslim Moro ini lahir sebagai respons atas meningkatnya tekanan rezim Presiden Ferdinand Marcos (1965–1986 M) yang memberlakukan kebijakan represif dan berwatak otoriter terhadap masyarakat Moro. MIM didirikan oleh seorang politisi Muslim bernama Uldog Maltalan, namun organisasi ini tidak mampu bertahan lama karena dibungkam oleh tekanan pemerintah. Setelah itu, pada tahun 1971 berdirilah organisasi perjuangan baru bernama *Moro Liberation Front* (MLF) yang tidak terlepas dari situasi politik era Marcos, khususnya setelah diterbitkannya **Presidential Proclamation No. 1081**. Sejak momentum tersebut, perjuangan kaum Moro terus berkembang meskipun mengalami berbagai perubahan mendasar akibat perbedaan ideologi dan strategi perjuangan. Dari tubuh MLF kemudian muncul berbagai organisasi lain seperti *Anshor el-Islam*, *Moro National Liberation Front* (MNLF) dipimpin oleh Hasyim salamat. Sejak Filipina merdeka tahun 1946, kondisi Muslim Moro belum mengalami perubahan berarti, karena pemerintah Filipina tetap melanjutkan pola kebijakan kolonial Amerika yang menekan minoritas Muslim. Pada tahun 1968 berdiri MIM sebagai gerakan terorganisir pertama, disusul MLF tahun 1971, kemudian MLF berubah menjadi MNLF di bawah Dr. Nur Misuari. Dari MNLF sebagian anggota memisahkan diri dan membentuk MILF yang dipimpin Hashim Salamat, dan pada tahun 1993 muncul pula kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin Abdurrazak Janjalani. Munculnya berbagai organisasi ini dipengaruhi oleh perbedaan ideologi perjuangan: sebagian bersifat moderat seperti MNLF dan MNLF Reformasi, sementara lainnya cenderung lebih radikal seperti MILF, bahkan ada yang berhaluan ekstrem seperti kelompok Abu Sayyaf.¹⁶

Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Gerakan Islam di Filipina

faktor-faktor terjadinya gerakan Islam di Filipina, secara garis besar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor internal

Penduduk Filipina tidak memiliki kesadaran nasional yang kuat, dan secara terang-terangan menyatakan keluhan mengenai minimnya kesatuan serta solidaritas. Pemerintah tidak dipandang sebagai figur pelindung, sehingga tidak memperoleh kepercayaan maupun loyalitas yang besar dari rakyatnya.

2. Faktor Ensternal

Di Filipina, pengaruh kekuatan luar dipandang sebagai faktor yang merusak seluruh susunan sosial yang dianggap sehat. Persoalan ini telah lama membayangi kehidupan bangsa Filipina, namun menjadi semakin serius pada masa kolonialisme Amerika Serikat. Warisan penjajahan tersebut dinilai bertanggung jawab atas maraknya ketertarikan terhadap produk-produk asing, yang sering disebut sebagai “mentalitas kolonial kita,” serta munculnya rasa rendah diri di hadapan bangsa kulit putih, sehingga menumbuhkan budaya meniru secara membuta. Kekaguman berlebihan terhadap kebudayaan luar ini

¹⁵ Benhard Masalle Bua, “Kontribusi ASEAN di Era Kepemimpinan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Antara Moro National Liberation Front (MNLF) dan Pemerintah Filipina” tahun 2024.

¹⁶ Abd. Ghofur, “Dinamika Muslim Moro Di Filipina Selatan Dan Gerakan Sparatis Abu SayyaF” Sosial Budaya, Vol. 13, No.2, 2016:181-187

menyusup ke dalam sistem pendidikan dan media berbahasa Inggris, dan menjadikan kemampuan berbahasa Inggris sebagai simbol utama martabat diri. Dampaknya, banyak yang kemudian beranggapan bahwa pendidikan formal di Filipina tidak memiliki keterkaitan dengan kebudayaan asli masyarakat, bahkan terlepas dari realitas kebudayaan rakyat Filipina sendiri.¹⁷

Gagalnya Upaya Pemerintah Untuk Memenuhi Hak-Hak Minoritas Moro

Pemerintahan Filipina telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan konflik Filipina Selatan yang terjadi antara gerakan separatisminoritas Moro dengan pemerintah Filipina. Hal ini tidak bisa dilepaskan karena adanya respon dunia internasional terhadap negara Filipina terutama dunia muslim. Sehingga Filipina mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pemberian hak otonom, pendirian beberapa lembaga Islam. Hak-hak otonom yang dijanjikan oleh pemerintah terhadap masyarakat muslim akhirnya patah ketika pada tahun 1946 pemerintah Manila membuat program pemukiman bagi orang Kristen dari Luzon dan Visaya di wilayah Moro berdasarkan UU. No. 1888 tanggal 22 Juni 1957 dibentuklah Commission On National Integration. Program ini sebenarnya kelanjutan dari politik integrasi yang dilakukan AS. Hal ini mengakibatkan peralihan posisi oleh Kristen di bidang politik dan ekonomi, sehingga menyababkan muslim Moro terpinggirkan. Selain itu, banyak usaha pemerintah untuk mengeeksploitasi hasil tambang atau sumber daya alam lainnya di wilayah masyarakat Moro di Mindanao. Hal ini dilakukan untuk keuntungan berbagai proyek industri di wilayah Utara Filipina.¹⁸

Perospek Perdamaian

Pada hakikatnya, *Tripoli Agreement* tahun 1976 menghasilkan dua poin utama; pertama, pembentukan pemerintahan otonom di kawasan Filipina Selatan dalam kerangka kedaulatan dan wilayah Republik Filipina. Kedua, daerah otonomi Muslim di Filipina Selatan mencakup Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Davao del Sur, South Cotabato, dan Palawan, termasuk seluruh kota serta desa yang berada di dalamnya. Namun, setelah kesepakatan tersebut dituntaskan, pihak pemerintah Filipina justru berusaha mengingkari hasil perjanjian dan memperkuat aksi sabotase terhadap kekuatan Muslim. Akibatnya, MNLF merasa dikhianati karena dari 13 wilayah yang disepakati hanya empat daerah yang bersedia masuk ke dalam otonomi.. Sikap pemerintah ini bertentangan dengan semangat *Tripoli Agreement* yang mengamanatkan bahwa 13 wilayah tersebut secara penuh menjadi bagian dari pemerintahan otonomi Mindanao. Jika dicermati setelah penandatanganan perjanjian tersebut, terlihat jelas bahwa Marcos hanya memanfaatkan proses negosiasi untuk memberi waktu baginya menyusun strategi dalam menekan gerakan perlawanan Moro. Pada tahap berikutnya, pemerintah Filipina secara terbuka menolak menjalankan isi *Tripoli Agreement*. Marcos tidak mengindahkan perjanjian Tripoli maupun berbagai kesepakatan internasional lainnya. Konsekuensinya, muncul rangkaian aksi perlawanan dan pemberontakan dari pihak Muslim Filipina terhadap pemerintah pusat hingga penghujung tahun 1977.

Pada tanggal 2 Desember 1996, Final Peace Agreement yang merupakan hasil perundingan panjang sejak tahun 1992 akhirnya berhasil dicapai oleh kedua pihak yang bersengketa, ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan oleh Nur Misuari selaku perwakilan MNLF dan Fidel Ramos sebagai wakil dari pemerintah Filipina. Proses penandatanganan Final Peace Agreement 1996 tersebut turut disaksikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, serta Sekretaris Jenderal OKI, Hamid Algabid. Keberhasilan

¹⁷ Malik Ibrahim, "Gerakan Islam Di Filipina Suatu Upaya Melihat Faktor Internal Dan Eksternal"

¹⁸ Eva Putriya Hasanah, "Studi Ekplanatif Penyebab Gerakan Seperti Minoritas Muslim Moro di Filipina" Journal of Integrative International Relations Vol. 3, No. 2, 2017:71-72

babak baru perundingan yang dimediasi Indonesia itu menghasilkan suatu kesepakatan sementara yang memuat 81 butir konsensus. Melalui Final Peace Agreement, dibentuk sebuah lembaga transisi bernama SZOPAD (Special Zone for Peace and Development) yang mencakup wilayah-wilayah yang sebelumnya diklaim oleh MNLF dalam Tripoli Agreement. Selain itu, disusun pula dua badan khusus untuk memperkuat pelaksanaan SZOPAD, yaitu SPCPD (Southern Philippines Council for Peace and Development) dan Consultative Assembly (CA) yang diberi mandat selama tiga tahun. Kedua institusi tersebut bertugas mempersiapkan kawasan itu menuju otonomi regional yang lebih mandiri, dengan kewenangan politik yang lebih luas serta wilayah yang lebih besar dibanding cakupan ARMM yang saat itu masih berlaku.¹⁹

KESIMPULAN

Sejarah komunitas Muslim Moro di Filipina Selatan merupakan komponen penting dalam perjalanan panjang Islam di kawasan Asia Tenggara. Meskipun Filipina identik dengan pengaruh kuat kolonialisme Spanyol dan Amerika Serikat, wilayah selatan seperti Mindanao, Sulu, Basilan, dan Tawi-Tawi sesungguhnya memiliki fondasi Islam yang tua dan berperan besar. Islam hadir di Filipina jauh sebelum bangsa Eropa tiba, dan berkembang menjadi kekuatan sosial, politik, serta budaya melalui berdirinya kesultanan-kesultanan Islam seperti Kesultanan Sulu dan Kesultanan Mindanao. Pengaruh Islam mencapai puncaknya dengan berdirinya Kesultanan Sulu pada tahun 1450 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Sharif Abu Bakar. Kesultanan ini berperan sebagai pusat otoritas politik dan keagamaan serta menjadi simpul perdagangan penting di Asia Tenggara. Ketahanan Kesultanan Sulu yang mampu bertahan selama lebih dari lima abad menjadikannya simbol keteguhan identitas politik dan spiritual masyarakat Muslim Moro. Kesultanan ini berhasil mempersatukan kelompok-kelompok etnis seperti Tausug, Samal, Yakan, dan Badjao dalam satu struktur sosial-politik berbasis Islam. Namun, kekuatan ini mulai mengalami kemunduran sejak meningkatnya intervensi kolonial Eropa, terutama setelah kedatangan Spanyol pada abad ke-16.

Kolonialisme Spanyol menjadi awal masa penderitaan panjang bagi komunitas Muslim di Filipina. Ketika Spanyol berhasil menguasai wilayah utara pada tahun 1521, mereka menghadapi perlawanan berlarut dari penduduk Muslim di selatan. Masyarakat Moro mempertahankan wilayah dan keyakinannya dengan berbagai bentuk perlawanan yang dilandasi semangat jihad. Penolakan ini terus berlangsung selama berabad-abad, bahkan ketika kekuasaan kolonial beralih kepada Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Pada masa kolonial, masyarakat Muslim Moro mengalami marginalisasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Kebijakan pemerintah kolonial, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Filipina setelah kemerdekaan, semakin memperlemah kedudukan Muslim Moro di Filipina Selatan.

Secara demografis, umat Islam Filipina yang dulunya mayoritas di beberapa wilayah kini menjadi minoritas akibat kebijakan kolonisasi dan transmigrasi internal yang dilakukan pemerintah pusat. Mereka dipinggirkan dari sistem politik nasional dan mengalami ketimpangan ekonomi yang tajam. Kondisi ini menjadi latar belakang munculnya gerakan perjuangan seperti Moro National Liberation Front (MNLF) yang dipimpin oleh Nur Misuari pada tahun 1969. Gerakan ini bertujuan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi wilayah Muslim di Filipina Selatan. Namun, pemerintah Filipina di bawah Ferdinand Marcos menanggapi perlawanan ini dengan kekerasan,

¹⁹ Firmanzah, "Intelektualita: Volume 06, Nomor 01, 2017 Dinamika Gerakan Pembelaan Muslim Moro di Filipina Selatan" :Studi Terhadap Moro National Liberation Front2017:43-46

memberlakukan darurat militer pada tahun 1972, serta menggerahkan pasukan besar ke Mindanao. Kebijakan represif tersebut justru memperkuat semangat perjuangan bangsa Moro dan memperluas dukungan rakyat terhadap MNLF.

Perkembangan gerakan Moro kemudian melahirkan faksi-faksi baru seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang dipimpin oleh Hashim Salamat pada tahun 1984, serta kelompok Abu Sayyaf yang muncul pada tahun 1993. MNLF lebih bersifat nasionalis dan politis, sementara MILF berorientasi pada penerapan hukum Islam dan perjuangan berdasarkan ideologi Islam. Sedangkan Abu Sayyaf cenderung ekstrem dan menggunakan kekerasan yang sering dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Meski strategi berbeda, ketiga kelompok ini memiliki tujuan yang sama, yakni menuntut keadilan, otonomi, dan pengakuan identitas Islam bagi masyarakat Moro di Filipina Selatan.

Upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dan kelompok Moro berlangsung panjang dan kompleks. Konflik ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga menyangkut identitas, agama, dan sejarah kolonialisme. Berbagai perundingan dan perjanjian damai telah diupayakan, termasuk keterlibatan negara-negara ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Ghofur, “Dinamika Muslim Moro Di Filipina Selatan Dan Gerakan Sparatis Abu Sayyaf” Sosial Budaya, Vol. 13, No.2, 2016.
- Ayni Nuril, “Masalah Moro: Sebuah Kajian Perkembangan Kasus Konflik Internal Moro Hingga Kancan Internasional (1946-2019)”, Dalam jurnal Bakaba, Vol.09 No.01.2021:10
- Benhard Masalle Bua, “Kontribusi ASEAN di Era Kepemimpinan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Antara Moro National Liberation Front (MNLF) dan Pemerintah Filipina” tahun 2024.
- Dewa Anggara,” Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)” Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1 2018:58-59
- Eva Putriya Hasanah, “Studi Ekplanatif Penyebab Gerakan Seperti Minoritas Muslim Moro di Filipina” Journal of Integrative International Relations Vol. 3, No. 2, 2017.
- Firmanzah, “Intelektualita: Volume 06, Nomor 01, 2017 Dinamika Gerakan Pembebasan Muslim Morodi Filipina Selatan” :Studi Terhadap Moro National Liberation Front2017.
- Gafur Abd, “Dinamika Muslim Moro Di Philipina Selatan Dan Gerakan Sparitis Abu Sayyaf”, dalam jurnal sosial dan budaya Vol, 13 No.02.2016. <https://minorityrights.org/communities/moro-muslims/>
- Hasaruddin, “Perkembangan Sosial Islam di Filipina”, dalam Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya.Vol,01 No.01.2019:62-63
- Malik Ibrahim, “Gerakan Islam Di Filipina Suatu Upaya Melihat Faktor Internal Dan Eksternal”
- Raden Mas Jerry Indrawan, “Resolusi Konflik Bagi Etnis Moro Di Filipina”, dalam Jurnal International & Diplomacy Vol. 2, No. 1.2016.
- Sa. Saifullah, “Umat Islam di Fiilipina Selatan”, dalam jurnal islamic Vol,03 No.01.2008:54
- Saifullah SA, “Umat Islam Di Filipina Selatan Sejarah, Perjuangan Dan Rekonsiliasi”, Islamic, Vol. 3, No. 1, 2008.
- Sari Meta Ratna, Dkk, “Studi Pendidikan Islam di Filipina”, dalam jurnal ilmiah keislaman, Vol,01 No.01. 2013.
- Syahraeni. A “Islam di Filipina” dalam Jurnal Adabiyah, Vol, 10 No.01.2010.193-196
- Wiharyanto Kardiyat, “Perkembangan Masalah Moro 1975-1994” dalam jurnal seri pengetahuan dan pengajaran sejarah, Vol.28 No.01.2014.